

KONKRETKAN REVOLUSI MENTAL

BASIS

menembus fakta



KENISCAYAAN
TUBUH - SELUBUNG

KITA TIDAK
AKAN MAKAN
COKELAT
LAGI?

HEIDEGGER:
MELAMPAUI
METAFISIKA

patung kertas
KUDA TERBAKAR 2014
karya
JOKO WIDODO 'TOYING'

Rp 20.000,00

DUA BULANAN, NOMOR 09 - 10, TAHUN KE-63, 2014

BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.
Jo Ditjen PPG
Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996
Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Redaksi

Sindhunata

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

A. Setyo Wibowo

B. Hari Juliawan

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Sekretaris Redaksi

Maria Daniar Ristanti

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Administrasi/ Distribusi

Maria Dwijayanti

Agustinus Mardiko

Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta

No. 0370285110 a.n. Sindhunata

BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN /

Sindhunata

Konkretkan Revolusi Mental ... 2

KACA BENGGALA / **A. Bagus Laksana**

Skizofrenia, Pemilu, dan Kebangsaan ... 4

LINGKUNGAN / **C. Bayu Risanto**

Kita Tidak akan Makan Cokelat lagi? ... 14

BAHASA / **Agustinus Gianto**

Modalitas dan Evidensialitas ... 18

BASIPEDIA / **B. Hari Juliawan**

Multikulturalisme ... 21

BASIPEDIA / **A. Setyo Wibowo**

Heidegger: Melampaui Metafisika ... 24

LAKON / **Sindhunata**

Sejenak Gelang Emas Itu di Tangannya ... 30

SOSIAL / **Muhtar Habibi**

Buruh di Lautan Tentara Cadangan Pekerja ... 35

MUSIK / **Aris Setiawan**

Idris Sardi: Tuntasnya Laku Hidup Bermusik ... 40

TAKAR BUKU / **A. Sudiarja**

Tiga Perempuan Berbagi Pengalaman Iman ... 42

RESENSI / **Bandung Mawardi**

Novel dan Modernitas ... 46

RESENSI / **Budiawan Dwi Santoso**

Selimut Budaya Visual ... 48

CERPEN / **Adi Zamzam**

Pohon Keramat ... 50

PUISI /

Lutfy Mairizal Putra - Ada Belatung di Bawah Bantalmu ... 54

Narudin - Kita Saksikan ... 54

Pieter Dolle - Halaman Akhir ... 55

SENI / **A. Setyo Wibowo**

Titarubi: Keniscayaan Tubuh-Selubung ... 56

FOTO / **Tarko Sudiarno**

Oase di Tengah Keramaian Kota ... 66

One Stop Travel Services

NUSA SANTANA PRIMA
Tour & Travel

☎ 513 873

Jl. Diponegoro 116 Yogyakarta

Our Services:

* Domestic and International Ticketing
* Domestic and International Hotel Reservation
* Outbound & Inbound Tour Package

* Incentive Tour
* Homestay Package
* Passport, Visa & Travel Insurance

* MICE Arrangement
* Airport Transfer & Car Rental
* Money Changer



BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Redaksi

Sindhunata

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

A. Setyo Wibowo

B. Hari Juliawan

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Sekretaris Redaksi

Maria Daniar Ristanti

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Administrasi/ Distribusi

Maria Dwijayanti

Agustinus Mardiko

Keuangan

Francisca Triharyani, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta

No. 0370285110 a.n. Sindhunata

BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN /

Sindhunata

Konkretkan Revolusi Mental ... 2

KACA BENGGALA / **A. Bagus Laksana**

Skizofrenia, Pemilu, dan Kebangsaan ... 4

LINGKUNGAN / **C. Bayu Risanto**

Kita Tidak akan Makan Cokelat lagi? ... 14

BAHASA / **Agustinus Gianto**

Modalitas dan Evidensialitas ... 18

BASIPEDIA / **B. Hari Juliawan**

Multikulturalisme ... 21

BASIPEDIA / **A. Setyo Wibowo**

Heidegger: Melampaui Metafisika ... 24

LAKON / **Sindhunata**

Sejenak Gelang Emas Itu di Tangannya ... 30

SOSIAL / **Muhtar Habibi**

Buruh di Lautan Tentara Cadangan Pekerja ... 35

MUSIK / **Aris Setiawan**

Idris Sardi: Tuntasnya Laku Hidup Bermusik ... 40

TAKAR BUKU / **A. Sudiarja**

Tiga Perempuan Berbagi Pengalaman Iman ... 42

RESENSI / **Bandung Mawardi**

Novel dan Modernitas ... 46

RESENSI / **Budiawan Dwi Santoso**

Selanjut Budaya Visual ... 48

CERPEN / **Adi Zamzam**

Pohon Keramat ... 50

PUISI /

Lufty Mairizal Putra - Ada Belatung di Bawah Bantalmu ... 54

Narudin - Kita Saksikan ... 54

Pieter Dolle - Halaman Akhir ... 55

SENI / **A. Setyo Wibowo**

Titarubi: Keniscayaan Tubuh-Selubung ... 56

FOTO / **Tarko Sudiarno**

Oase di Tengah Keramaian Kota ... 66

One Stop Travel Services

NUSA SANTANA PRIMA
Tour & Travel

☎ 513 873

Jl. Diponegoro 116 Yogyakarta

Our Services:

- * Domestic and International Ticketing
- * Domestic and International Hotel Reservation
- * Outbound & Inbound Tour Package

- * Incentive Tour
- * Homestay Package
- * Passport, Visa & Travel Insurance

- * MICE Arrangement
- * Airport Transfer & Car Rental
- * Money Changer





SKIZOFRENIA

Pemilu dan Kebangsaan

A. BAGUS LAKSANA

Pada awal Juni 2014, Suto dan Saleh, dua tukang becak yang sudah lama saling kenal itu terlibat perkelahian hebat demi mendukung capres pilihan masing-masing.

Mereka berdua biasanya rukun berdampingan mangkal di seputaran Jl. Kemuning, Pamekasan, Madura, kali ini saling ejek. “Nanti kalau jadi presiden, tiga hari setelah dilantik Jokowi akan meninggal dunia karena tak kuat memikirkan Indonesia,” kata Saleh, pendukung berat Prabowo, kepada Suto (*Tribun News* online 3 Juni 2014).

Peristiwa ini bukan hal biasa. Kontestasi politik tingkat elite Pilpres 2014 kiranya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perbaikan nasib rakyat kecil. Akan tetapi, mengapa hal ini bisa memicu ketegangan personal yang begitu intens di antara para tukang becak? Tak hanya itu, konon angka perceraian di Pengadilan Agama meningkat pasca Pilpres. Misalnya, Dianto (30), warga Kebayoran Baru, cekcok hebat dengan istrinya yang tidak mau mencoblos Prabowo. “Kami saling ejek di rumah hingga bertengkar hebat. Akhirnya saya memutuskan untuk cerai. Tapi, saya disuruh damai lewat mediasi,” kata Dianto (<http://www.nonstop-online.com/2014/07/pilpres-1-000-000-istri-dicerai-suami/>).

Ditengarai, Pilpres 2014 adalah “fenomenal,” baik dalam pengertian positif maupun negatif, kalau tidak mau dikatakan “skizofrenik.” Bagaimana tidak, Pilpres kali ini menimbulkan suasana “panas” dan tegang. Antagonisme antarkubu amat tinggi hingga ke masyarakat lapisan bawah. Tak terhitung lagi banyaknya

Foto: TARKO SUDIARNO / Sejumlah seniman mengadakan ruwatan dengan membakar ogoh-ogoh pada tanggal 7 Agustus 2014 di Omah Petroek, Karangklethak, Wonorejo, Yogyakarta. Ritual ini dimaksudkan untuk tolak bala dan menyatukan kembali berbagai kalangan masyarakat yang sempat terpecah belah karena Pemilu 2014.

kata-kata kasar, saling serang tanpa kesantunan di berbagai media massa dan media sosial. Polarisasi politik melanda hampir semua kalangan, termasuk tentara, artis, bahkan agamawan.

Pada tingkat elite, komunikasi politik juga telah kehilangan keadaban atau *civility*. Jumlah, jenis, dan intensitas *black campaign* amat mengkhawatirkan karena menyentuh identitas agama, ras, dan etnis. Semisal, Jokowi diragukan keislamannya. Ia diisukan beragama Katolik dengan nama baptis Heribertus. Nasionalisme Jokowi juga dipermasalahkan. Dikabarkan, ia adalah keturunan Cina dan telah menjadi warga Singapura. Ini semua *absurd*. Ditinjau dari semua segi, baik penampilan fisik maupun sejarah hidupnya, teramat sulit untuk mempercayai semua tuduhan itu. Ironisnya, meski Prabowo jelas mengaku dan bahkan membanggakan diri memiliki banyak anggota keluarga Kristiani (termasuk ibunya), isu sektarian mengenai afiliasi agama capres lebih banyak menimpa Jokowi. Prabowo hanya sedikit terkena. Konon ia diisukan mau membakar semua gereja di Indonesia.

Masih dalam negativitas ini, Pilpres 2014 ditandai oleh fenomena, hadirnya tabloid *Obor Rakyat*. Tabloid sesungguhnya memuat semiotika super negatif, letupan politik yang skizofrenik: membabibuta, irasional, amat kasar, dan *plainly wrong*. Sayangnya, kebohongan gaya *Obor Rakyat* ini ternyata memiliki pengaruh riil pada sikap para pemilih, misalnya di Jawa Barat, di mana tabloid ini beredar agak luas. Karena itu, ada asumsi bahwa sebagian warga bangsa kita memang masih hidup dalam semangat tribalisme, bukan semangat kebangsaan, sehingga gampang dipengaruhi oleh politik penuh tipu daya seperti ini.

Pemilu dan wacana kebangsaan

Satu unsur yang cukup mencolok dari Pemilu 2014 adalah wacana nasionalisme dalam arti luas, yang diketengahkan dengan cara-cara yang barangkali lebih dramatis, bahkan emosional, dibandingkan Pemilu sebelumnya. Dan kita tahu bahwa persoalan refleksi atas fundasi dan narasi bangsa teramat mendesak.

Seperti ditegaskan Paul Ricoeur, setiap masyarakat memiliki *socio-political imaginaire*, yaitu sekumpulan wacana simbolis yang bisa berperan sebagai pengakuan atau penguatan kembali (*reaffirmation*) akan identitas kolektifnya yang sudah terbangun, atau bisa juga menjadi sebuah dobrakan untuk meretas berbagai kebuntuan dan pembekuan dalam narasi



tersebut (*rupture*). Sebagai reafirmasi, wacana simbolis *imaginaire* ini bekerja sebagai ideologi yang secara positif mengulangi dan menampilkan kembali wacana awal yang menjadi fundasi pendirian sebuah masyarakat, yakni simbol-simbol dasarnya. Dengan demikian, *the imaginaire* berfungsi mempertahankan dan merawat identitas kelompok karena setiap budaya menciptakan diri dengan cara menarasikan kisah-kisah tentang masa lalunya.



Foto: TARKO SUDIARNO

Menurut Ricoeur, bahaya dari tabiat wacana seperti ini adalah bahwa reafirmasi akan identitas masa lalu bisa diselewengkan, biasanya oleh kaum elite penguasa ekonomi politik, ke dalam wacana yang melulu bersifat mistifikatoris, yaitu wacana yang kehilangan kekuatan kritisnya karena dipakai untuk membenarkan bahkan memuja kekuatan politik yang sedang berkuasa. Dalam konteks yang demikian, simbol-simbol dari komunitas bangsa itu menjadi “beku”, bahkan menjadi sekadar

fetish karena diperlakukan sebagai semacam “jimat” yang menipu dan menutup-nutupi kenyataan (Kearney 2004: 138ff).

Maka, kata Ricoeur, wacana simbolis *imaginaire* juga mesti tampil sebagai sebuah *rupture*, wacana dengan kekuatan untuk meretas kebekuan, untuk menghentikan pembekuan dan pen-jimat-an yang menipu ini. Kalau demikian, wacana ini tampil sebagai wacana utopia karena bersikap kritis terhadap kekuatan-kekuatan

politik yang tidak setia pada dimensi “lain” yang mengatasi kekinian (*the elsewhere*), yakni dimensi yang terutama bersangkut-paut dengan cita-cita komunitas itu, sebuah dimensi yang belum tercapai dan seharusnya menjadi orientasi bagi langkah masyarakat tersebut.

Ricoeur menyebut wacana ini sebagai wacana utopia yang positif. Namun, dalam pandangan Ricoeur, wacana utopia pun tidak selalu bersifat positif. Ada wacana utopis yang berbahaya karena bersifat skizofrenik lantaran melulu memproyeksikan masa depan yang statis tanpa sanggup menciptakan kondisi-kondisi untuk mewujudkannya. Hal inilah yang terjadi dengan utopia raksasa yang digagas oleh Marxisme dan Leninisme: memproyeksikan lenyapnya negara tanpa melakukan langkah-langkah yang terukur.

Dalam kasus seperti itu, utopia menjadi sekadar konsepsi masa depan yang tercerabut dari masa kini dan masa lalu. Bahkan, Ricoeur menyebut utopia seperti ini sebagai alibi untuk mengonsolidasikan kuasa yang menindas. Wacana utopia berubah menjadi ideologi yang mistifikatoris dan menipu manakala wacana itu membenarkan dan meneruskan penindasan masa kini demi pembebasan masa depan. Maka, wacana ideologi yang meneruskan masa lalu dan utopia yang secara simbolis membuka masa depan haruslah saling melengkapi. Jika dipisahkan satu sama lain, hasilnya adalah sebuah patologi politis.

Selama Pilpres 2014 wacana nasionalisme teramat sering muncul. Berbagai istilah atau terminologi nasionalis pun diciptakan: “Indonesia Bangkit”, “Indonesia Kuat,” “Macan Asia”, “Koalisi Merah Putih”, “Energi Indonesia”, dan lain sebagainya. Beberapa situs bersejarah juga dipakai untuk memberi aura nasionalis. Rumah Polonia, tempat tinggal Soekarno, digunakan untuk deklarasi kubu Prabowo-Hatta dan kepentingan kampanye pasangan ini. Sementara itu, kubu Jokowi memanfaatkan Tugu Proklamasi sebagai situs historis simbolis. Di situ mereka mengadakan syukuran dan acara untuk merayakan kemenangan setelah pengumuman KPU tanggal 22 Juli.

Perilaku itu memperlihatkan bahwa gagasan fundasi bangsa yang menyangkut momen pendirian bangsa (*founding moment*) dan figur pendiri bangsa (*founder*) menjadi arena yang dimasuki dan ditafsirkan kembali. Tentu saja tidak ada yang netral, murni, dan lugas dalam proses hermeneutika publik semacam ini karena semua ini adalah bagian dari konstruksi pemaknaan politis yang partikular dan berhubungan dengan kepentingan

tertentu, yaitu perebutan kekuasaan. Itu sebabnya Pemilu menjadi saat berharga, di mana rakyat diajak untuk berwacana, memasuki kembali dan menafsirkan momen-momen amat penting ketika bangsa ini lahir, memikirkan jati diri dan masa depannya.

Wacana kebangsaan selama Pilpres 2014 memang istimewa karena hingar-bingar, penuh dengan energi kontestasi dan persaingan. Ada begitu banyak simbol nasionalisme yang diperebutkan oleh kedua kubu. Prabowo menampilkan diri sebagai penerus cita-cita Soekarno, meski sedang berjuang melawan calon presiden dari PDI Perjuangan, partai yang secara historis lebih terhubung dengan figur dan warisan Soekarno. Pakaian Prabowo, yaitu peci dan model safari *epaulette* warna terang, juga secara agak jelas didesain sebagai *mimesis* simbolis dari era Soekarno dengan tujuan menyiratkan semangat Perjuangan ‘45.

Dalam orasinya, Prabowo juga menawarkan kerangka ekonomi yang amat nasionalis dengan nada anti-asing yang cukup kuat. Secara konsisten dan berulang-ulang, ia melontarkan gagasan bahwa kekayaan negara ini mengalir (“bocor”) ke luar negeri. Ia sering pula berbicara mengenai “pemerintah yang menjadi boneka pihak asing”, “yang suka menjual tanah air ke pihak asing”, dan sebagainya. Singkatnya, menurut wacana nasionalisme ekonomis gaya ini, kita masih dijajah. Prabowo juga mengembuskan wacana adanya kolonialisme baru. Sebagai gantinya, ia menyodorkan sebuah visi negara yang mandiri dan sejahtera, yang tidak mengimpor pangan, yang putra-putranya berkecukupan protein sehingga menjadi kuat dan bisa

Wacana utopia berubah
menjadi ideologi yang
mistifikatoris dan menipu
manakala wacana itu
membenarkan dan
meneruskan penindasan
masa kini demi pembebasan
masa depan.

bersaing dengan bangsa-bangsa lain (cf. Pidato Prabowo di Gelora Bung Karno, 22 Juni 2014).

Dengan demikian, terlihatlah dimensi utopis dari wacana Prabowo mengenai nasionalisme. Ia mencita-citakan Indonesia yang makmur sehingga dihormati negara lain. Baginya, politik luar negeri yang kuat harus didasarkan pada kondisi kemakmuran rakyat dan kemajuan internal bangsa. Dengan retorika yang berapi-api, ia berusaha menyadarkan publik mengenai kekayaan bernilai ribuan triliun rupiah yang hilang. Dalam debat perihal impor daging sapi, dimensi utopis ini menjadi lebih mencolok. Dalam debat capres ke-5 (5 Juli 2014) yang membahas persoalan ekonomi, Jokowi memahami kebutuhan akan impor daging sapi, tetapi dalam bentuk *carcass* sehingga bisa dijual lebih murah dan sebagainya, sehingga “tukang bakso pun bisa hidup dari situ.” Dengan demikian impor ini tidak begitu merugikan rakyat. Menanggapi hal ini, Prabowo menawarkan pemikiran yang jelas lebih utopis: ia ingin sapi-sapi itu lahir di Indonesia sehingga kita tidak perlu mengimpor *carcass* sama sekali. Namun, wacana utopis ini tidak didasari oleh strategi pencapaian, sehingga terkesan sekadar retorika belaka.

Dalam hal ini, Jokowi lebih realistis dan strategis. Mengingat carut-marutnya keadaan, impor *carcass* adalah sebuah langkah yang lebih taktis dan *workable*. Sedangkan Prabowo sering meloncat ke utopia sebagai cita-cita tanpa bisa menerjemahkan ke dalam langkah strategis yang konkret. Yang lebih parah, loncatan retorika nasionalis ini juga mengandung sifat skizofrenik. Mengapa? Prabowo lupa akan keadaan riil kubunya sendiri, Koalisi Merah Putih, ikut bertanggung jawab secara langsung atas carut-marutnya impor daging sapi dan berbagai permasalahan struktural lain.

Hal inilah yang ditunjuk oleh Yusuf Kalla dalam debat, menanggapi pernyataan kampanye Prabowo bahwa negara kita telah dikuasai sistem kleptokrasi atau kekuasaan para “maling.” Kalla bertanya: siapakah dan berada di kubu manakah maling-maling itu? Meminjam istilah Ricoeur, pernyataan Prabowo menjadi utopis dalam pengertian negatif dan skizofrenik, karena melupakan atau buta terhadap desakan realitas. Selain itu, pernyataannya juga mistifikatoris karena dengan sengaja menutup-nutupi bagian penting yang problematis dari realitas.

Kalau diberi ruang kuasa, wacana mistifikatoris ini akan mengarah pada terciptanya patologi politik yang serius, yakni hidup politik yang rusak karena didera

aneka disfungsi dan penyakit yang secara sengaja dipelihara demi kepentingan mereka yang berkuasa. Seperti dikatakan Ricoeur, wacana *imaginaire* ini menjadi mistifikatoris manakala kehilangan taring kritis untuk mendobrak situasi yang membeku karena menjadi alat kepentingan kaum yang sedang berkuasa.

Agak ironis bahwa dalam wacana ekonomi nasionalisnya, Prabowo tak berbicara mengenai kolonialisme ekonomis oleh pengusaha Indonesia sendiri. Ia cenderung mengobarkan sentimen ekonomi nasionalis dengan menggambarkan kekuatan asing sebagai kekuatan yang mengeksploitasi bangsa. Sebagai pengusaha besar, kelupaan Prabowo ini bisa menjadi indikasi sebuah mistifikasi nasionalisme ekonomi.

Selama masa kampanye, saya kebetulan berada

Dunia para korban ini lenyap
tertelan sunyi di antara kata-kata
Prabowo. Ada ironi yang amat
menggangu dalam penafsiran
diri yang ia kumandangkan
dengan gemuruh di video itu:
ia sekarang menjadi “korban”
kecurangan Pemilu.

di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau. Saya agak kaget karena jalan-jalan Berau didominasi poster Prabowo-Hatta. Hanya ada beberapa poster Jokowi-JK, itu pun terbatas di pusat kota Tanjung Redeb saja. Namun, agak jelas bahwa kehadiran masif (*ubiquity*) dari poster Prabowo-Hatta adalah sekadar sebuah *simulacrum*, kepura-puraan. Kenyataannya justru sebaliknya: dominasi *ubiquity* poster itu adalah usaha menutupi ketidakhadiran (*absence*) yang problematis. Di provinsi ini, rupanya Prabowo meninggalkan jejak bisnis yang bermasalah, lewat PT Kiani Kertas yang berhenti beroperasi dan masih berutang gaji pada para karyawan sampai hari ini. Beberapa penduduk lokal menyatakan terus terang

bahwa tidak mungkin Prabowo menang di provinsi itu karena kasus itu. Ternyata, Kiani Kertas pun meminjam modal dari perusahaan asing. Semua data ini susah didamaikan dengan retorika nasionalis Prabowo untuk menambah daya tawar rakyat dan negara Indonesia dengan kebijakan pro petani dan rakyat kecil di bidang kehutanan dan pertanian.

Salah satu strategi mistifikasi yang biasa adalah usaha memberi tafsiran yang baru pada aspek-aspek yang “problematis” dari diri sendiri atau kelompoknya. Barangkali strategi ini mirip dengan persoalan pencitraan baru pada tokoh dengan rekam jejak yang problematis pada masa lampau. Mistifikasi ini bisa dilakukan secara nyata dengan “menghubungkan” aspek atau tokoh “problematis” ini dengan situasi kekinian bangsa yang dihubungkan dengan “reinterpretasi” atas momen fundasi dan pendiri bangsa.

Dalam hal ini, menarik untuk menyimak rekaman video pernyataan Prabowo paska pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Dalam rekaman berdurasi hampir 25 menit (24 Juli 2014), Prabowo menampilkan diri sebagai seseorang yang bersumbangsih dalam demokratisasi Indonesia lewat dinas militer. Ia bangga menjadi prajurit, yakni patriot yang membela tanah air dan membangun bangsa. Ia menepis isu kudeta yang hendak dilakukannya di masa lalu. Meski isu kudeta tak terbukti, ia mengaku *legowo* berhenti dari dinas militer atas dasar sikap keprajuritan, tidak protes dan tidak *mbalelo*. Bertahun-tahun kemudian ia terjun ke politik: membangun partai dari nol karena terdorong oleh kenyataan bahwa kekayaan negeri ini dikuasai asing. Ia hendak membebaskan bangsa dari belenggu ini lewat demokrasi.

Namun, dalam narasi baru tentang dirinya ini Prabowo bungkam perihal penculikan para aktivis. Dari Prabowo, tidak ada pengakuan, apalagi permintaan maaf kepada para korban dan keluarganya. Dunia para korban ini lenyap tertelan sunyi di antara kata-kata Prabowo. Ada ironi yang amat mengganggu dalam penafsiran diri yang ia kumandangkan dengan gemuruh di video itu bahwa ia sekarang menjadi “korban” kecurangan Pemilu.

Kemudian, ia menempatkan diri sebagai pemimpin yang menghadapi situasi yang sama dengan para pemimpin Indonesia di berbagai era yang krusial, tahun 1945, 1965, dan 1998. Seperti mereka, ia merasa dihadapkan pada pilihan untuk membela kebenaran (melawan ketidakadilan) atau menyerah. Tentu saja,

seperti para pemimpin bangsa kita dulu, ia tidak mau menyerah, melainkan melawan.

Di akhir pidato itu, Prabowo mengimbau para pengikutnya untuk siap menghadapi penderitaan, untuk tidak menyerah, untuk tidak mau jadi budak dan bangsa kacung, untuk bertekad menjadi bangsa yang berdaulat, dan untuk menyusun barisan kembali.

Dengan gaya seperti seorang komandan perang, ia menantang delapan juta pengikutnya menunjukkan kesetiaan sejati dan menyusun kekuatan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan mengatur strategi sambil menunggu perintah selanjutnya. Akhirnya ia menantang para pengikutnya untuk menjawab panggilan pemimpinnya, untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. “Merdeka!” begitu Prabowo mengakhiri pidatonya.

Skizofrenia gaya Prabowo sebenarnya tercermin secara agak konsisten dalam moda “intimidasi” di berbagai orasinya. Ia berulang-ulang menyatakan tidak akan memakai kekerasan, tetapi hanya akan mengerahkan masa pendukungnya. Dalam proses pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), kubu pendukung Prabowo meneruskan moda intimidasi verbal yang disertai dengan pengerahan masa, juga mengancam akan menculik ketua KPU Husni Kamil Manik dan membakar Metro TV. Sebelumnya, kubu Prabowo juga mengatakan akan mengerahkan ribuan saksi dan ratusan pengacara ke MK, selain bertruk-truk alat bukti. Habiburokman, pengacara kubu Prabowo, menolak kemungkinan rekonsiliasi karena pendukung Prabowo tidak akan rela dan akan melakukan apapun untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Ahli hukum ini menyatakan akan membiarkan para pendukung Prabowo melakukan apapun, karena mereka hidup dalam alam demokrasi, asalkan sesuai dengan hukum (*The Jakarta Post*, 20 Agustus 2014).

Moda dan suasana intimidatif ini diteruskan pada saat hari pengumuman keputusan MK, 21 Agustus 2014. Pada hari itu, orasi-orasi pada demonstrasi itu juga menggebu, campuran antara mengejar kepentingan diri dan *yel-yel* nasionalisme yang terasa hambar dan dangkal, bahkan *lebay*, persis karena bau mistifikasinya yang sangat menyengat. Muncul seorang pendukung yang berpuisi berjudul “Indonesia Menangis”, lalu disambut dengan *yel-yel* “Merdeka... Hidup Prabowo, Hidup Indonesiaku.” Dan masa pendukung Prabowo pun harus dibubarkan dengan *water canon*.

Dimensi “mistifikasi” dari seluruh drama ini menjadi lebih gamblang karena terjadi di tengah seruan sebagian masyarakat agar Prabowo bersikap realistis, apalagi semua pernyataan dan ancaman bombastis kubu Prabowo dinyatakan tak terbukti oleh MK. Lewat pengadilan MK, neologisme “sistematis, terstruktur, dan masif” terbukti hanya ungkapan mistifikatoris dan skizofrenik karena tak didukung dengan kesaksian dan bukti yang memadai. Skizofrenia ini menjadi makin parah karena kubu Prabowo maju ke PTUN dan Kepolisian RI. Ketika jalur ini pun macet, kubu Prabowo bergerak di DPR dan mencoba mengembalikan sistem Pilkada langsung oleh rakyat ke mekanisme lewat DPRD. Bagi banyak orang, sikap ini benar-benar ungkapan sebuah politik yang skizofrenik, sebuah delusi mental yang parah, yang secara membabi buta membungkus realitas nafsu dan kepentingan diri ke dalam *simulacrum* mekanisme demokratis.

Politik utopia positif

Sebaliknya di seberang sana, setelah terpilih, Jokowi menerjemahkan retorika nasionalisme ekonomi dengan strategi, antara lain membongkar berbagai mafia yang berada di balik kekacauan dunia bisnis Indonesia selama bertahun-tahun, khususnya di sektor energi. Isu ini sudah mencuat pada debat terakhir (5 Juli 2014). Waktu itu, Jokowi mengatakan tentang adanya mafia energi yang sudah menjadi rahasia umum dan mengkritik jawaban Hatta Rajasa yang cuma mau renegosiasi dengan perusahaan asing tetapi tidak menyebut soal mafia sama sekali.

Cara pikir Jokowi ini mengindikasikan visi nasionalisme ekonomi yang bukan sekadar utopia yang menipu, melainkan utopia kritis yang positif, yang mendobrak kebuntuan. Cara pikir ini bukan utopia yang skizofrenik yang hanya memproyeksikan masa depan tanpa berani melakukan langkah terukur dan konkret. Namun, visi utopis kritis ini pun bisa menjadi mistifikatoris bila dalam perjalanan bisa dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan partisan atau didominasi oleh ketidakjujuran. Pemerintahan Jokowi-Kalla benar-benar harus waspada terhadap bahaya ini. Kontroversi yang ditimbulkan oleh dipilihnya Hendro Priyono dan Rini Mariani Soemarmo dalam Tim Transisi Jokowi seharusnya menjadi peringatan akan bahaya mistifikasi ini. Harus diingat pula bahwa PDI-P memiliki rekam jejak yang tidak sempurna dalam soal pengusutan

pelanggaran HAM pada masa lalu dan ketidakberesan di bidang ekonomi pada zaman pemerintahan Megawati.

Sembari mewaspadaai godaan mistifikasi, berbagai terobosan program Jokowi yang terangkum dalam Nawa Cita dan usaha membangkitkan lagi cita-cita Trisakti dari Bung Karno diakui banyak pihak sebagai sebuah utopia yang positif. Ambil contoh konsep pembangunan poros maritim Jokowi. Pengamat politik Rizal Sukma, direktur eksekutif CSIS, menjelaskan konsep poros maritim Jokowi sebagai sebuah visi yang besar yang tetap realistis dan operasional. Gagasan poros maritim ini merupakan visi mengenai apa yang ingin dibangun Indonesia, yang sekaligus merupakan “seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan. Harapannya, Indonesia akan mewujudkan menjadi kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*).

Selain itu, papar Rizal Sukma, poros maritim juga dapat dimengerti sebagai doktrin atau visi yang memberi arahan tujuan bersama (*sense of common purpose*) bangsa Indonesia untuk membentuk diri sebagai “Poros Maritim Dunia,” “Kekuatan di antara Dua Samudra.” Maka, poros maritim adalah visi peran yang hendak diemban Indonesia di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekali lagi, konsep ini visioner, tetapi sekaligus operasional ketika Jokowi menerjemahkannya dengan seperangkat agenda konkret, misalnya pembangunan “tol laut”, pembangunan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta peningkatan keamanan maritim dengan memiliki pesawat *drone* untuk mengamankan laut Indonesia.

Mengingat proyek besar ini, Rizal Sukma mengusulkan langkah strategis kerja sama multilateral, misalnya pembentukan *Indonesia Maritime Partnership Initiative* (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura (*Kompas*, 20 Agustus 2014). Sekali lagi, untuk menghindari tergencetnya visi ini oleh kekuatan mistifikatoris (baca: kepentingan ekonomi politik kelompok tertentu), pemerintahan Jokowi-JK harus betul-betul melakukan pengawalan kritis.

Politik berbasis kultur

Ketika ditanya apakah dalam praktik politik sekarang (khususnya Prancis), telah muncul wacana utopia yang autentik (*genuine*), Paul Ricoeur menjawab demikian:

Barangkali wacana utopia yang autentik ini tidak ada dalam politik itu sendiri, melainkan dalam persimpangan antara politik dan wacana-wacana kultural lainnya. Kekecewaan kita akan politik sekarang ini justru terjadi karena kita membebaskan kepada politik semua harapan kita, sampai-sampai politik menjadi sebuah kepura-puraan utopia yang menggelembung.

(Kearney 2004: 140)

Pikiran Ricoeur ini menarik dan bisa dihubungkan dengan munculnya kepemimpinan berbasis kultur kerakyatan yang terlihat dalam fenomena Jokowi. Bagi banyak orang, tampilnya Jokowi adalah letupan sebuah “utopia yang autentik”. Maksudnya, ia dimunculkan dari rahim budaya rakyat, dari cita-cita rakyat yang terlihat dalam narasi-narasi rakyat yang selama ini ditenggelamkan oleh bangunan elite politik yang terpaku pada usaha membangun dan menggelembungkan dasar komersial (*the commercial foundation*) dari sebuah sistem ekonomi politik yang penuh bias kepentingan kelas elite atau oligarki kapitalis (Ali, 2014).

Menurut Limas Sutanto, fenomena Jokowi menyiratkan hadirnya kepemimpinan yang bukan deduktif, melainkan eksperiensial yang tidak mengandalkan kemampuan orasi berapi-api, kepandaian memutar balik kata, memainkan angka, dan berteriak lantang (yang gampang dipakai untuk menutupi sebuah utopia mistifikatoris yang skizofrenik), melainkan mengandalkan kemampuan komunikasi interpersonal dan intrapersonal (kualitas pribadi, kebeningan jiwa dan nurani) yang diasah lewat perjumpaan autentik dengan kenyataan hidup rakyat biasa dan seluruh kenyataan sosial, kultural, dan natural dari “Indonesia”, serta lewat wawan hati mendalam dengan diri sendiri. Kepemimpinan model ini didorong oleh kecerdasan afektif yang dibangun atas olah kejujuran dan kepekaan suara hati (Sutanto, 2014).

Kalau begitu, terpilihnya Jokowi merupakan hasil dari perjumpaan-perjumpaan yang terbangun antarwarga, manakala warga saling berkisah mengenai dambaan dan konsepsi *imaginaire* mereka akan bangsanya. Fenomena Jokowi barangkali adalah juga peringatan mengenai kebangkrutan gaya politik yang tercerabut dari kultur yang lebih luas, politik yang hanya berasal dari “mainan” dan perbincangan lingkaran kecil para politikus dengan jaring-jaring kepentingan komersial mereka. Fenomena Jokowi membuktikan

bahwa politik membutuhkan jejaring kultur yang berkembang di masyarakat warga, yakni segala daya dan ekspresi kreatif dari rakyat, termasuk di dalamnya fenomena voluntarisme atau “relawan” yang menjadi salah satu penanda khas Pilpres 2014. Agar politik yang autentik bisa berjalan, dibutuhkan keutamaan wargawi, yang berisikan kecerdasan kemanusiaan dan batiniah yang juga terungkap secara nyata dalam partisipasi politik yang lebih luas. Jadi, bukan sekadar ikut Pemilu, tetapi menyediakan ruang kultural sekaligus nilai-nilai (karakter) tertentu yang menjadi fundamen humanistik dan spiritual bagi bertumbuhnya politik yang autentik ini.

Dalam batas-batas tertentu, Pilpres 2014 mengisyaratkan bahwa politik yang berbasiskan “kultur” ini bisa mengalahkan politik yang hingar-bingar, gaduh, bahkan galak, dan skizofrenik. Di hadapan politik berbasis kultur ini, sifat skizofrenik dari politik yang seperti ini menjadi gamblang karena para aktornya tidak lagi bisa membedakan antara realitas dan ilusi, amat mirip dengan orang yang mengidap skizofrenia. Dengan ngotot, mereka seakan-akan bermain dalam dunia publik dan hendak mengurus *res publica* (“urusan publik”), tetapi, di mata banyak orang lain, mereka tak lebih dari manusia-manusia yang melarikan diri dalam dunia amat privat (meskipun dilakukan secara kolektif) yang penuh ilusi. Karena, manakala ekspresi kultural rakyat sudah jelas-jelas menjadi “realitas” yang harus diperhitungkan, mereka ini masih secara obsesif, dengan segala cara, mau menggapai sesuatu di dunia ilusinya.

Pilpres 2014, juga memuat undangan untuk menjaga autentisitas pemerintahan lewat praktik-praktik kultural kewargaan. Revolusi mental yang dicanangkan Jokowi mestinya terhubung dengan praktik-praktik kewargaan, semisal saling berbagi narasi dan cita-cita mengenai warisan *imaginaire* bangsa, yang pada gilirannya juga mendapatkan tempat dalam mekanisme politik penguasa. ●

Dr. A. Bagus Laksana,

dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

RUJUKAN

Ali, Fachri, “Tempat Kalla dalam ‘Revolusi Jokowi’”, *Kompas*, 22 Agustus 2014

Kearney, Richard, *On Paul Ricoeur: The Owl of Minerva*, Ashgate 2004.

Sutanto, Limas, “Revolusi Kepemimpinan,” *Kompas*, 22 Agustus 2014